

**EKSISTENSI TAKSI ONLINE DALAM
USAHA TRANSPORTSI DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

MARTINA FINA DEI

Abstrak

Keberadaan transportasi online sebenarnya adalah sebagai dampak globalisasi dan perubahan teknologi terhadap situasi pasar saat ini. Dampak perkembangannya telah mendapatkan hati di masyarakat dan menjadi salah satu transportasi alternatif yang cukup populer bagi masyarakat ibu kota. Namun permasalahan timbul setelah banyak diantara sopir taksi konvensional meski tidak semua, semisal Blue Bird dan Express berdemo menuntut agar taksi yang berbasis aplikasi ditutup. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam skripsi ini diangkat dua permasalahan yaitu : Pertama, mengenai perlindungan hukum terhadap para pelaku usaha transportasi taksi online ditinjau dari UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kedua, mengenai penyelesaian sengketa usaha antara pelaku usaha transportasi taksi konvensional dan pelaku usaha transportasi taksi online menurut UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, yaitu membahas mengenai pemberlakuan ketentuan hukum secara *in action* di masyarakat. Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian disimpulkan bahwa : Pertama, berdasarkan Pasal 157 UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur tentang adanya ketentuan lanjutan dari UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sekaligus payung hukum bagi layanan transportasi berbasis aplikasi yaitu dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Menteri No. 26 Tahun 2017, dimana dalam pasal 2 huruf c dan pada Bab IV yang meliputi Pasal 50 sampai dengan pasal 52 diatur mengenai penyelenggaraan angkutan umum dengan aplikasi berbasis teknologi informasi (online). Kedua, Peraturan Menteri No. 26 Tahun 2017 adalah ketentuan lanjutan dari UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diterbitkan sebagai respon pemerintah atas tuntutan dan desakan dari para pelaku usaha transportasi konvensional mengenai keberadaan dan kegiatan transportasi online, sekaligus sebagai payung hukum bagi pelaku usaha transportasi online dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat beroperasi seperti halnya transportasi taksi konvensional.

Kata Kunci : Eksistensi, Taksi, Online

**EXISTENCE ONLINE TAXI IN
TRANSPORTION BUSINESS REVIEWED FROM
LAW OF NUMBER 22 YEAR 2009 ABOUT
TRAFFIC AND ROAD TRANSPORT**

MARTINA FINA DEI

Abstract

The existence of online transport is in fact the impact of globalization and technological change on the current market situation. The impact of its development has gained the hearts in the community and become one of the most popular alternative transport for the capital community. But the problem arises as many of conventional taxi drivers, although not all, such as Blue Bird and Express demanding that the application-based taxi closed. In connection with this matter, in this thesis is raised two problems, namely: First, concerning the protection of law against the perpetrators of taxi online business in terms of Law no. 22 Year 2009 About Traffic and Angku-tan Road. Second, concerning the settlement of business dispute between conventional taxi businessman and the businessman of taxi transportation online according to Law no. 22 of 2009 on Traffic and Road Transportation. The methodology used in this study employs the empirical normative approach, which is to discuss the implementation of law in action in the community. Based on the discussion on the results of the study concluded that: First, based on Article 157 of Law no. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation, stipulates the existence of further provisions of Law no. 22 ta 2009 on Traffic and Road Transport as well as legal umbrella for application-based transportation services that is in the Minister of Transportation Regulation no. 32 Years of Public Transportation of Persons with Non-Motorized Motor Vehicles, which were subsequently revised to Ministerial Regulation no. 26 of 2017, which in Article 2 (c) and Chapter IV covering Article 50 through Article 52 is stipulated on the implementation of public transport with an information technology-based application (online). Second, Ministerial Regulation no. 26 of 2017 is a further provision of Law no. 22 of 2009 on Traffic and Road Transportation issued as a government response to the demands and villages of conventional transportation business actors regarding the existence and activities of online transportation, as well as a legal umbrella for the online transport business actors with several requirements that must be met in order to operate as well as transportation conventional taxi.

Keywords: Existence of Taxi, Online